

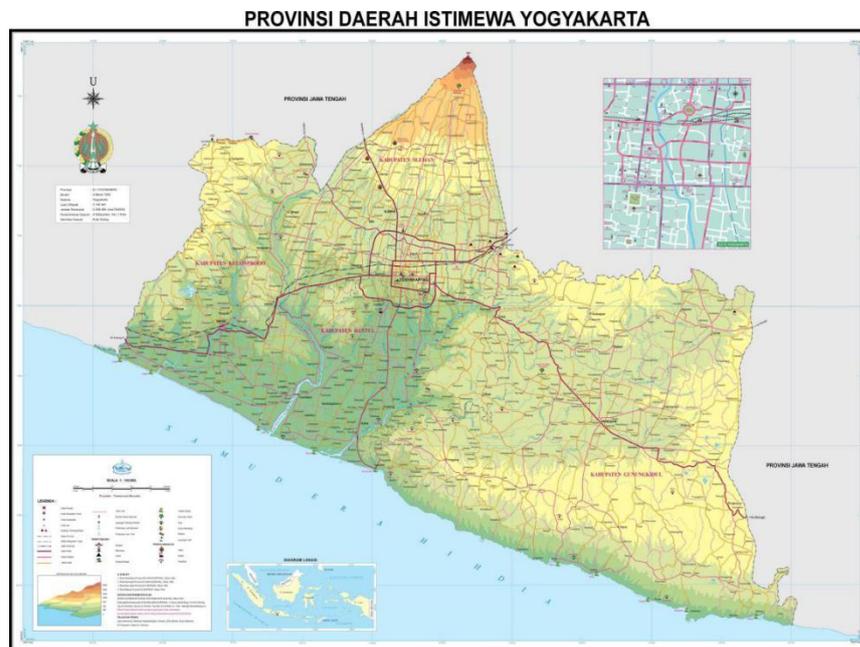
## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### A. Gambaran Umum Daerah

##### 1. Keadaan Geografis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

**Gambar 4.1 Peta Daerah Istimewa Yogyakarta**



Sumber : <http://peta-kota.blogspot.com/>

Provinsi D.I. Yogyakarta terletak antara 7°.33' - 8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00' - 110°.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km<sup>2</sup> atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.860.359,67 km<sup>2</sup>). di bagian Selatan D.I. Yogyakarta dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian

Timur Laut, Tenggara, Barat, dan Barat Laut dibatasi oleh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi: Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut, di sebelah Tenggara yaitu Kabupaten Wonogiri, Kabupaten

Purworejo di sebelah Barat, dan Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut. Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada ketinggian antara 100 m - 499 m dari permukaan laut tercatat sebesar 65,65 persen, ketinggian antara 500 m - 999 m sebesar 5,04 persen dan ketinggian di atas 1000 m sebesar 0,47 persen. Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari pegunungan dan dataran rendah yang terdiri dari Pegunungan Selatan dengan ketinggian 150 - 700 m, Gunung bearpi Merapi di bagian Utara dengan ketinggian 80 - 2.911 m, di bagian Barat ada pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian 0 - 572 m sedangkan dataran rendah berada antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian 0 - 80 m. Menurut BMKG Stasiun Geofisika kelas 1 Yogyakarta, suhu udara rata - rata di DI Yogyakarta tahun 2017 menunjukkan angka 26,15°C lebih rendah dibandingkan rata-rata suhu udara pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 26,7°C. Masing-masing luas wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta**  
**Tahun 2017**

Kabupaten/Kota	Luas (km <sup>2</sup> )
(1)	(2)
Kulonprogo	586,27
Bantul	506,85
Gunungkidul	1 485,36
Sleman	574,82
Kota Yogyakarta	32,5

Sumber : DIY Dalam Angka 2018

## 2. Pembagian Wilayah Administratif

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki luas 3.185,80 km<sup>2</sup> terdiri dari empat Kabupaten dan satu Kota yaitu Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta dengan jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa yaitu 78 Kecamatan dan 393 Kelurahan/Desa, berikut adalah data kecamatan/Kelurahan masing-masing daerah :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2017**

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	12	88	-
Bantul	17	75	-
Gunungkidul	18	144	-
Sleman	17	86	-
Kota Yogyakarta	14	-	45

S

Sumber : DIY dalam angka 2018

Dari tabel 4.2, diketahui bahwa Kabupaten Gunungkidul merupakan Kabupaten/kota dengan jumlah Kecamatan dan Desa terbanyak yaitu 18 Kecamatan dan 144 Desa. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah Kecamatan paling sedikit yaitu Kabupaten Kulonprogo dengan jumlah 12 Kecamatan, dan Kabupaten/Kota yang memiliki Kelurahan terbanyak yaitu Kota Yogyakarta dengan 45 Kelurahan.

### 3. Kependudukan

Menurut hasil proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta 2010-2020, D.I. Yogyakarta tahun 2017 memiliki jumlah penduduk 3.762.167 jiwa, dengan presentase jumlah penduduk laki-laki

49,46 persen dan penduduk perempuan 50,54 persen.. dengan luas wilayah 3.185,80 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di D.I. Yogyakarta tercatat 1.181 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta dengan 13.007 jiwa per km<sup>2</sup> dengan luas wilayah hanya sekitar satu persen dari luas DIY. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul yang memiliki wilayah terluas mencapai 46,63 persen, memiliki kepadatan penduduk terendah yang dihuni rata-rata 491 jiwa per km<sup>2</sup>.

**Tabel 4.3**

**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta 2015 dan 2017**

Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk		Laju pertumbuhan penduduk (%)
	2015	2017	2015-2017
Kulonprogo	412.198	421.295	1,10
Bantul	971.511	995.264	1,22
Gunungkidul	715.282	729.364	0,98
Sleman	1.167.481	1.193.512	1,11
Kota Yogyakarta	412.704	422.732	1,21
<b>D.I.Yogyakarta</b>	<b>3.679.176</b>	<b>3.762.167</b>	<b>1,12</b>

Sumber : DIY dalam angka 2018

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk DIY sebesar 3.679.176 jiwa pada tahun 2015 dan 2017 mencapai 3.762.167 jiwa dengan laju pertumbuhannya sebesar 1,12 persen. Daerah dengan jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2017 yaitu Kabupaten Sleman yaitu mencapai 1.193.512 jiwa dengan laju pertumbuhannya 1,11 persen. Sedangkan daerah dengan jumlah penduduk terendah pada tahun 2017 yaitu Kabupaten Kulonprogo sebanyak 421.295 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,10 persen. Pada tahun 2017 Kabupaten Bantul berada di urutan kedua terbanyak yaitu dengan jumlah penduduk 995.264 dengan laju pertumbuhannya 1,22 persen. Sedangkan di urutan kedua terendah yaitu Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk sebanyak 422.732 jiwa dengan laju pertumbuhannya 1,21 persen dan Kabupaten Gunungkidul sebanyak 729.364 jiwa dengan laju pertumbuhannya yaitu sebesar 0.98 persen.

## **B. Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta**

Ketimpangan pendapatan antar daerah tergantung dari besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penerimaan pendapatan pada wilayah tersebut. Indeks willaimson adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ketimpangan pendapatan suatu wilayah/provinsi dalam periode tertentu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.4**  
**Indeks Williamson Kab/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta**  
**Tahun 2011-2017 (persen)**

<b>Kab/Kota</b>	<b>Tahun</b>						
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kulonprogo	0.104	0.107	0.108	0.109	0.109	0.110	0.118
Bantul	0.150	0.148	0.149	0.150	0.150	0.150	0.151
Gunungkidul	0.132	0.135	0.136	0.137	0.137	0.137	0.138
Sleman	0.026	0.028	0.031	0.032	0.034	0.035	0.036
Kota Yogyakarta	0.464	0.465	0.464	0.465	0.466	0.466	0.465

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa pada tahun 2017 indeks williamson tertinggi yaitu Kota Yogyakarta dengan nilai 0.465 persen hal ini dikarenakan karena Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk yang relatif tinggi dan pendapatan perkapita yang juga tinggi dan merupakan pusat ekonomi dan pusat pemerintahan Provinsi D.I. Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Sleman mempunyai indeks williamson terendah hanya 0.036 persen.

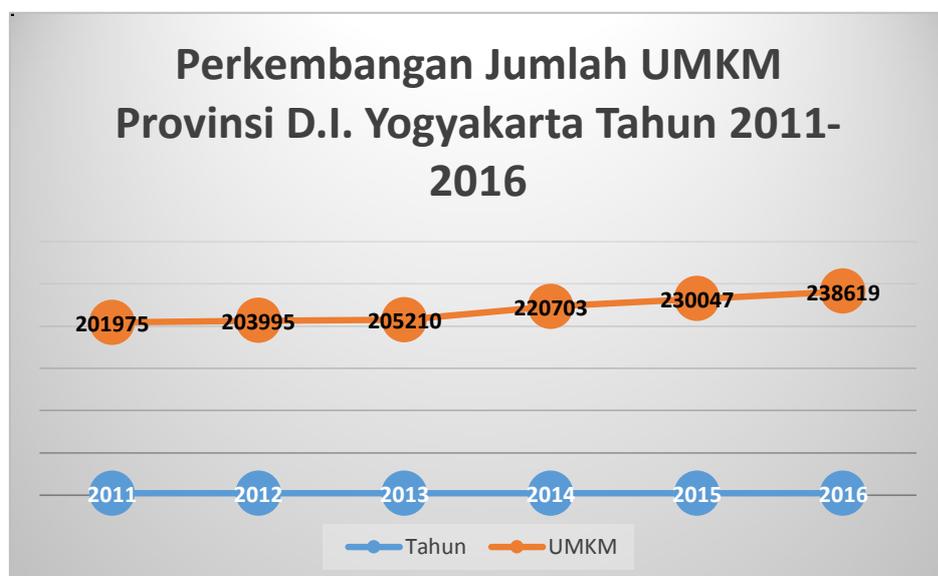
## C. Gambaran Umum Variabel Operasional

### 1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan UU no.20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah dalam pasal 3 di sebutkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai daerah kawasan wisata dan Kota pelajar sangat berpotensi untuk mengembangkan industri besar ataupun kecil untuk menopang perekonomian masyarakat dan daerah karena dari sektor UMKM angkatan kerja dapat terserap.

**Grafik 4.1**

**Jumlah UMKM Kab/Kota Berdasarkan Jenis Usaha  
Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2012/2017 (Unit)**



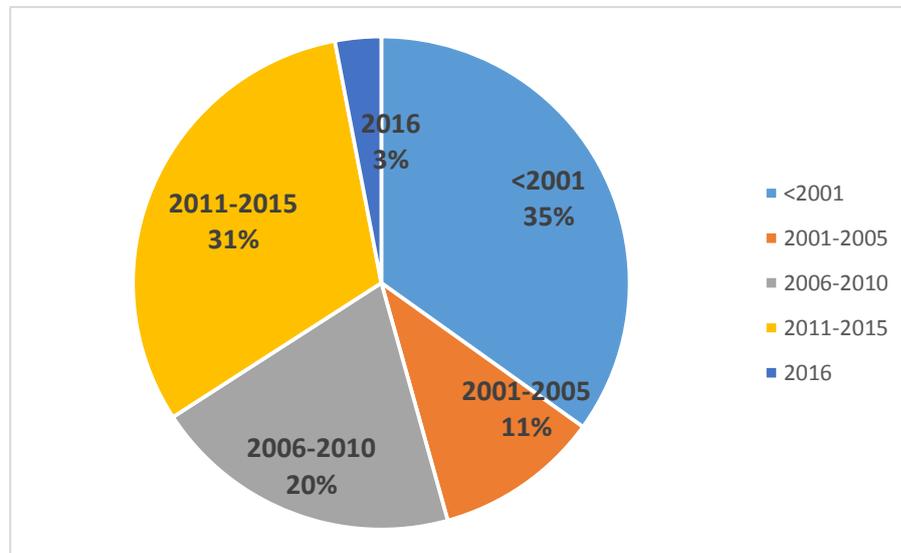
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM DIY

Berdasarkan grafik 4.1 maka dapat terlihat bahwa perkembangan UMKM DIY meningkat setiap tahun. Dunia usaha di DIY pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). dari hasil SE2016 Listing, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 524,9 ribu usaha atau 98,36 persen dari total usaha nonpertanian di DIY. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja DIY lebih dari 1.044,5 ribu orang atau sekitar 78,98 persen dari total tenaga tenaga kerja nonpertanian.

UMK mempunyai peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian DIY. Lima Kabupaten/Kota di DIY masih menjadi konsentrasi UMK, masing-masing memiliki persentase UMK diatas 97 persen. Secara presentae, jumlah UMK terbanyak di Gunungkidul yaitu 99,7 persen dari total usaha nonpertanian, sedangkan terendah di Kota Yogyakarta dengan jumlahh UMK sebesar 97,2 persen. Jumlah UMK DIY hasil pencacahan sampel SE2016 tahun 2017 sebanyak 521 ribu usaha. Dilihat distribusinya jumlah UMK terbesar di Sleman dan Bantul, masing-masing 27 persen dan 28,6 persen. Sementara yang di Gunungkidul sebanyak 21,4 persen sedangkan terendah di Kota Yogyakarta dan Kulonprogo masing-masing sebanyak 12,8 persen dan 12,3 persen (BPS DIY, 2018).

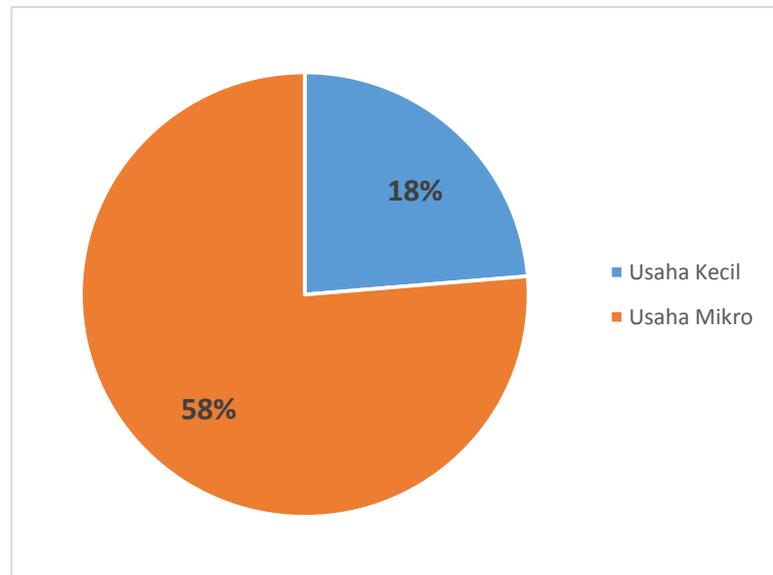
**Gambar 4.2**

**Preentase Jumlah UMK menurut Tahun Bereperasi, 2017**



Sumber : BPS DIY 2018

Penyerapan keterampilan bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah keatas akan menjadi aksi yang sangat strategis agar mereka mampu mencipkakan usaha sendiri. Data SE2016-Lanjutan memberikan memberikan informasi bahwa UMK telah menyerap sekitar 82,1 persen tenaga kerja nonpertanian DIY. Penyerapan tenaga kerja UMK terjadi paling pada usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (kategori G) mencapai 28,5 persen. Usaha pengolahan (Kategori C) dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) menempati urutan kedua dan ketiga dalam penyerapan tenaga kerja pada UMK, masing-masing sebesar 28,2 persen dan 16,3 persen.

**Gambar 4.3****Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Status Usaha, 2017**

Sumber : BPS, SE2016-Lanjutan

Dari gambar 4.3 terlihat bahwa pada tahun 2017 pencapaian penyerapan terbanyak yaitu pada usaha mikro sebesar 58% dan usaha kecil sebesar 18%.

**2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Menurut Sukirno (2004), angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Angkatan kerja terdiri atas golongan yang berkerja dan golongan yang menganggur yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau menerima pendapatan.

Menurut data strategis Daerah Istimewa Yogyakarta (2018), gambaran keadaan ketenagakerjaan di Pulau Jawa memperlihatkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, TPAK D.I. Yogyakarta masih yang paling tinggi. Sebaliknya TPT D.I. Yogyakarta menjadi yang terendah. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa meskipun penduduk yang terjun di pasar kerja cukup tinggi namun presentase mereka yang masih menganggur cukup rendah.

**Tabel 4.5**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2017 (persen)**

Provinsi	TPAK		TPT	
	2017	2017	2017	2017
	Feb	Agust	Feb	Agust
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DKI Jakarta	66,91	61,97	5,36	7,14
Jawa Barat	60,65	63,34	8,49	8,22
Jawa Tengah	67,15	69,11	4,15	4,57
<b>DIY</b>	<b>71,96</b>	<b>71,52</b>	<b>2,84</b>	<b>3,02</b>
Jawa Timur	66,14	68,78	4,10	4,00
Banten	63,66	62,32	7,75	9,28
Indonesia	66,34	66,67	5,33	5,50

Sumber : BPS RI

Berdasarkan Tabel 4.5 maka dapat terlihat bahwa pada tahun 2017, DIY memiliki tingkat TPAK tertinggi yaitu sebesar 71,96 persen pada periode

Februari dan 71,52 pada periode Agustus. Sedangkan TPT, DIY berada di posisi terendah yaitu pada periode Februari 2017 sebesar 2,84 persen dan periode Agustus 2017 sebesar 3,02 persen.

Berdasarkan tabel 4.6 selama periode Agustus 2012 sampai Agustus 2017, Kabupaten Gunungkidul selalu mempunyai TPT terendah, dan tertinggi di Kota Yogyakarta kecuali Tahun 2012. Periode Agustus 2017, TPT Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta masing-masing sebesar 1,65 persen dan 5,08 persen. Perbedaan yang cukup tinggi tersebut disinyalir karena penduduk Kabupaten Gunungkidul tidak memperhatikan jenis pekerjaan berdasarkan ujazah yang dimiliki.

Sementara TPAK menurut Kabupaten/Kota tahun 2017 hampir sama dengan kondisi tahun sebelumnya. Antara tahun 2015-2017 TPAK tertinggi di Kabupaten Kulonprogo dan terendah adalah Kota Yogyakarta. Fenomena ini memberikan informasi bahwa penduduk yang berusia 15 tahun keatas di Kota Yogyakarta lebih sedikit yang memilih untuk terjun di angkatan kerja, mereka kemungkinan lebih memilih untuk melanjutkan sekolah di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 4.6

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2011 - 2017(persen)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Kulonprogo	75,40	75,61	82,33	75,62	74,61
Bantul	71,26	66,78	74,26	67,84	72,21
Gunungkidul	80,43	77,87	83,57	70,77	74,50
Sleman	66,44	65,67	76,55	65,45	70,17
Yogyakarta	67,28	64,38	81,02	66,70	65,72
TPAK DIY	71,52	69,29	71,05	68,38	71,52
Nasional	67,88	66,77	66,6	65,76	66,67
Kulonprogo	3,04	2,85	2,88	3,72	1,99
Bantul	3,70	3,36	2,57	3,00	3,12
Gunungkidul	1,38	1,69	1,61	2,90	1,65
TPT Sleman	5,64	3,28	4,21	5,37	3,51
Yogyakarta	5,33	6,45	6,35	5,52	5,08
DIY	3,86	3,24	3,33	4,07	3,02
Nasional	6,13	6,17	5,94	6,18	5,50

Sumber : BPS DIY 2018

### 3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan produk domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita). Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena didalamnya mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan dicapai oleh penduduk selama periode tertentu. Produk domestik regional bruto (PDRB) juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah atau masyarakat.

**Tabel 4.7**  
**Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, dan Produk Domestik Bruto per Kapita D. I. Yogyakarta, 2011-2017**

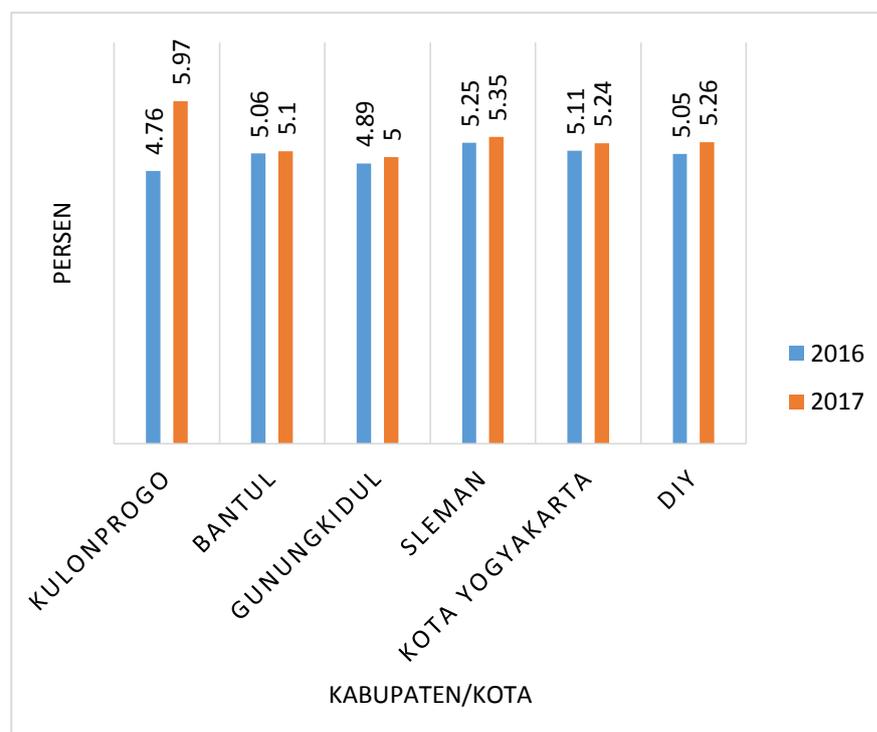
Tahun	PDRB (Milyar Rp) Sumber: BPS DIY dalam angka 2018 Berlaku Konstan		Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB per Kapita Berlaku (ribu RP)
	(2)	(3)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	71 370	68 050	5,21	20 333
2012	77 370	71 702	5,37	21 745
2013	84 925	75 627	5,49	23 624
2014	92 842	79 536	5,16	25 526
2015	101 448	83 474	4,95	27 573
2016	110 009	87 688	5,05	29 589
2017	119 173	92 301	5,26	31 677

Sumber : BPS DIY 2018

Berdasarkan tabel 4.7 pada periode 2017 perekonomian DIY tumbuh sebesar 5,26 persen dibandingkan tahun 2016. Membainnya perekonomian DIY ini juga diikuti oleh perbaikan tingkat kesejahteraan secara global. Pada periode yang sama, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku telah mencapai Rp. 31.677 ribu atau meningkat sebesar Rp. 2.122 ribu dari tahun sebelumnya.

Gambaran perekonomian D.I. Yogyakarta menunjukkan bahwa setiap Kabupaten berkontribusi terhadap PDRB DIY dengan porsinya masing-masing.

**Grafik 4.2**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2016-2017**



Sumber : BPS DIY 2018

Berdasarkan grafik 4.2 maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 Kabupaten Kulonprogo memiliki pertumbuhan ekonomi yang tertinggi yaitu Kabupaten Kulonprogo yaitu sebesar 5,9 persen, hal ini menandakan bahwa Kabupaten Kulonprogo tumbuh lebih cepat dari Kab/Kota lain. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi terendah yaitu sebesar 5,00 persen.

#### **4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu : (1) Indeks Harapan Hidup, yang diukur dengan angka harapan ketika lahir; (2) Indeks Pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; (3) Indeks Pendapatan, yang diukur dengan daya beli konsumsi per kapita.

Jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa, IPM Daerah Istimewa Yogyakarta berada di peringkat ke dua, setelah DKI Jakarta. Selain itu, IPM D.I. Yogyakarta masih berada di atas IPM Nasional. IPM D.I. Yogyakarta pada tahun 2017 mencapai 78,89 persen sedangkan di tingkat Nasional sebesar 70,81 persen. Pada tahun 2017, peningkatan indeks pembangunan pendidikan cukup tinggi akibat tingginya peningkatan nilai angka Harapan Sekolah di D.I. Yogyakarta.

**Tabel 4.8**

**Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten / Kota  
Di D.I. Yogyakarta Tahun 2013 -2017 (Persen)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	70.14	70.68	71.52	71.52	72.38
Bantul	76.78	77.11	77.99	78.42	78.67
Gunungkidul	66.31	67.03	67.41	67.82	68.73
Sleman	80.26	80.73	81.20	82.15	82.85
Kota Yogyakarta	83.61	83.78	84.56	85.32	85.49
DIY	76,44	76,81	77,59	78,38	78,89
<b>Nasional</b>	<b>68,31</b>	<b>68,9</b>	<b>69,55</b>	<b>70,18</b>	<b>70,81</b>

Sumber : BPS DIY 2018

Berdasarkan tabel 4.8 maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 IPM tertinggi yaitu Kota Yogyakarta yakni sebesar 85,49 di atas Nasional sebesar 70,81 persen. sedangkan IPM terendah kabupaten Gunungkidul sebesar 68,73 persen, artinya terjadi gap sebesar 16,76 poin. Pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul masih tergolong rendah tertinggal dibandingkan kabupaten/Kota lain.